

TESIS

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA
ANAK YANG DISEBABKAN OLEH PAKSAAN DARI KORBAN**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

Dosen Pembimbing

- 1. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL**

Oleh :

**YOSSI ASTUTI
1820112051**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK
YANG DISEBABKAN OLEH PAKSAAN DARI KORBAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG)

**(Yossi Astuti, 1820112051, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 124
halaman, 2021)**

ABSTRAK

Putusan hakim merupakan aspek yang sangat penting dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu kasus. Putusan Hakim No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg dalam Tindak Pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan adanya paksaan dari korban anak dirasa kurang adil dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG. 2) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG. 3) Apakah dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG sudah memenuhi asas keadilan. Tipe penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian ini adalah: 1) Hakim dalam pembuktiannya dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban menganut teori pembuktian *negatief wetelijk* yang terdapat dalam Pasal 183 dan 184 ayat 1 (satu) KUHAP 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada perkara No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg berdasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Namun unsur “melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 diperbarui dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi salah satu dasar pertimbangan yuridis tidak terpenuhi dalam kasus ini. 3) Asas keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg dirasa kurang adil dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam pertimbangan tidak melihat dari keterangan saksi korban dan terdakwa sebagai bukti yang relevan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa, karena tindak pidana persetubuhan itu terjadi karena adanya paksaan dan ancaman dari saksi korban. Sehingga hakim dirasa kurang adil dalam menjatuhkan hukuman. Mahkamah Agung dan DPR perlu untuk merevisi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, agar dalam undang-undang tersebut tidak hanya memperhatikan kepentingan korban saja tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pelaku.

Kata Kunci: *Analisis yuridis putusan, Persetubuhan, Paksaan Korban, Anak*

**Juridical Analysis of the Imposing Imprisonment to the Offender of
Copulation against Children Caused by the Coercion of the Victim
(Study of Padang District Court Decision No. 79 / Pid.Sus / 2018 / PN.PDG)**

**(Yossi Astuti, 1820112051, Masters Program in Law, Andalas University, 124
pages, 2021)**

ABSTRACT

The judge's decision is a very important and necessary aspect to resolve a criminal case. The judge's consideration or *ratio decidendi* is an argument or reason used as a legal consideration which is the basis before deciding a case. Judge's Decision No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg in the crime of sexual intercourse with a child caused by coercion from a child victim is deemed unfair in making a decision on the defendant. The problems are: 1) How is the proof of the crime of sexual intercourse with children caused by coercion from the victim in the Padang District Court Decision No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG. 2) What is the judge's consideration in imposing a criminal decision on the perpetrator of the crime of sexual intercourse with a child caused by coercion from the victim in the Padang District Court Decision No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG. 3) Whether in imposing imprisonment on the perpetrator of the crime of sexual intercourse with a child caused by coercion from the victim in the Padang District Court Decision No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG has fulfilled the principle of justice. The type of research used in this research is the normative juridical method. The conclusions that the authors get from the results of this study are: 1) The judge in his proof in the crime of sexual intercourse with a child caused by coercion from the victim adheres to the proof theory *negative wetelijk* contained in Articles 183 and 184 paragraph 1 (one) KUHAP 2) Judges' considerations in sentenced the defendant in case no. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg based on juridical and non-juridical considerations. However, the element of "doing tricks, committing a series of lies, or persuading children to commit or allow obscene acts to be carried out" in Article 81 paragraph (2) of Law no. 35 of 2014 updated with Law no. 17 of 2016 concerning Child Protection which is one of the basic juridical considerations is not fulfilled in this case. 3) The principle of justice in the decision of the Padang District Court no. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg is considered unfair in making a decision. The judge in his consideration did not see the testimony of the victim's and defendant's witnesses as relevant evidence to give a lighter sentence to the defendant, because the crime of sexual intercourse occurred because of coercion and threats from the victim's witness. So that the judge feels unfair in giving the sentence. The Supreme Court and the DPR need to revise the Law on Child Protection, so that the law does not only pay attention to the interests of the victims but also the interests of the perpetrators.

Keywords: *Juridical analysis of decisions, intercourse, coercion of victims, children*

